BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”¹

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukannya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemitusan suatu perkawinan.

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 14.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdara dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Pasal 26 KUHPerdara, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan Pasal 26 KUHPerdara adalah Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christn Indonesiers) yang menetapkan bahwa tentang perkawinan UU yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974 maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No1 Tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.²

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu :

1. Menurut Soekanto, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.
2. Menurut Van Djik, perkawinan menurut hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada

² Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978. Hlm. 91.

masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.³

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.”⁴

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kepatern atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.⁵

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang adalah beragama Islam, oleh Hukum Adat mereka dilandasi dengan Hukum Islam. Dengan dilandasi Hukum Islam maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu menegakkan agama Allah, dalam arti

³ Tolib, Op. Cit., hlm. 221-222.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, hlm. 90.

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

mentaati perintah dan larangan Allah, mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.⁶

Pada umumnya bentuk perkawinan yang biasa yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari, seperti diantaranya masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang. Kawin lari yang dimaksudkan Suku Bathin V adalah ketika seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari kediaman perempuan tersebut menuju ke rumah salah satu keluarga (meman) dari perembuan itu. Kawin lari suku Bathin V dilakukan atas persetujuan perempuan dan laki-laki yang melaksanakan kawin lari tersebut (lahi kawin).

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Sedangkan sahnya perkawinan menurut Hukum Adat menurut H. Hilman Hadikusumuma, “di Indonesia sahnya perkawinan umumnya ditentukan pada agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.” Maksudnya jika telah dilaksanakan berdasarkan tata tertib Hukum Agamanya maka perkawinan itu telah sah di menurut Hukum Adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang belum menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “sepelegu” (pemuja roh) dikalangan orang Batak atau agama Kaharingan dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan

⁶ Muhammad, Op. Cit., hlm. 30.

lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut Hukum Adat setempat.⁷

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai peccatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1990.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

Aturan-aturan Hukum Adat Perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa.

2. Azas-Azas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai Istri dan kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.

- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu, rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.⁸

3. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan. Mencari calon istri bagi setiap pria. Menurut hukum Adat ada tiga sistem yaitu:

- a. Sistem Eksogami, dalam sistem ini, orang diahruskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Sistem ini misalnya terdapat di daerah gayo, Alas, Tapanuli, Minang Kabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami proses perluanakan di mana larangan perkawinan itu dilakukakn hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.
Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa, akan berubah mendekati sistem eleutherogamie.
- b. Sistem Endogamsi, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang suku keluarganta sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia.
Perkawinan ini sekarang sudah jarang terjadi walaupun ada hanya pada suku toraja saja, tetapi inipun sudah mulai berubah lagi dan juga pada dasarnya perkawinan endogami ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakatnya yang menganut sistem kekeluargaan parental.
- c. Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalag larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan Ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara Bapak atau Ibu. Atau larangan kawin dengan periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, dan anak tiri.
Ternyata sistem ini meluas di Indonesia misalnya di Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Blitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa-Madura.

Dimasa sekarang nampak kecendrungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan Eksogami dan Endogami walaupun disana

⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

sini masih nampak keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan.⁹

4. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di Indonesia ada tiga macam, yaitu:

- a. Perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur, terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti :

1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat, maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
2. Perkawinan ganti istri adalah disebabkan istri meninggal, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu (silitikar).
3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan, maka suami akan terus menerus bertempat kediaman dipihak kerabat istri.

⁹ St. Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 97.

4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B maka pada yang lain kerabat B mengambil istri kerabat A.
 5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna jadi penerus keterunan pihak istri.
- b. Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat yang *patrilineal alter nend* (kebakakan beralih-alih dan matrilineal).

Bentuk perkawinan semenda ini, terdapat bermacam- macam, yaitu:

1. Semenda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
2. Semenda lepas yaitu perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk di kerabat istri.
3. Semenda rungu yaitu perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.

4. Semenda anak dagang yaitu bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup dating dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.
 5. Semenda ngangkit yaitu perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk di kawinkan dengan anak prianya, sehingga suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.
- c. Perkawinan bebas adalah perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- Dalam pelaksanaan perkawinan bebas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan semacam ini terdapat pada masyarakat adat parental.¹⁰

5. Cara-Cara Perkawinan

Di Indonesia ada berbagai macam cara perkawinan. Antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda caranya. Demikian dengan istilah yang digunakan berbeda juga.

¹⁰ A. Suriyani Mustari Pide, *Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014. hlm. 25.

Cara-cara perkawinan dapat dilaksanakan dengan melalui :

a. Perkawinan Pinang

Kebiasaan yang terjadi disini yaitu setelah laki-laki dan perempuannya itu setuju, orang tua dari si laki-laki datang kepada orang tua si perempuan untuk meminang anak gadisnya. Jika diterima oleh orang tua dari pihak perempuan tidak langsung dilanjutkan dengan perkawinan melainkan dengan diadakan pertunangan terlebih dahulu.

Menurut kompilasi hukum Islam bab 1 Pasal 1 butir (a) yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam peminangannya ini dapat langsung dilakukan orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan dengan perantara yang dapat dipercaya. Sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

Pertunangan yang dilakukan dapat mengikat apabila hadiah pertunangan telah diserahkan. Di Jawa alat pengikat ini disebut : *Paningset* dan di Sunda disebut *Panyancang*. Menurut kebiasaan masyarakat adat pengikat itu menjadi milik dari famili perempuan. Alat pengikat ini dipakai juga sebagai tanda larangan apabila ada laki-laki lain yang hendak mengawannya. Dalam artian jangan sampai terjadi ada seorang perempuan dipinang oleh laki-laki sekaligus dalam waktu bersamaan. Pertunangan ini dimaksudkan juga agar mendapatkan suatu kepastian bahwa perkawinan itu benar-benar akan terjadi.

Dari pihak laki-laki dapat memutuskan hubungan pertunangan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pertunangan itu atau secara diam-diam laki-laki yang telah meminang itu menjauhi dan meninggalkan perempuan yang meninggalkannya.

Karena pertunangan ini belum menimbulkan maka pihak bebas memutuskan pertunangan. Menurut adat Jawa apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak perempuan, maka keluarganya harus mengembalikan *paningset* dua kali lipat harga semula kepada pihak laki-laki. Sedangkan apabila yang memutuskan itu pihak laki-laki maka *paningset* yang telah diberikan kepada pihak perempuan itu hilang dan tidak ada kewajiban perempuan untuk mengembalikan *paningset* itu.

b. Perkawinan Lari Bersama

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan oleh lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tu tidak setuju. Kedua calon suami istri yang telah sepakat melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabatnya atau dapat juga kerumah penghulu. Setelah itu baru diadakan pembicaraan adat yang telah berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak. Pada umumnya yang menjadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi di perkawinan yang dilakukan dengan

lamaran dan pertunangan. Misalnya memberi *Paningset* kepada pihak calon istri.

c. Kawin Bawa Lari

Yang disebut kawin bawa lari adalah pertama, lari dengan wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain. Kedua, melarikan wanita secara paksa.

6. Syarat-syarat perkawinan

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

1. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

B. Delik Adat

Delik adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Pengertian delik adat menurut beberapa ahli, adalah sebagai berikut :
Prof. Dr. Mr. Cornelis Van Vollenhoven mengatakan yang dimaksud delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

Prof. Dr. Mr. Barend ter Haar, B.Zn. mengatakan delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan di mana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H menyatakan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.

Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud atau tidak berwujud apakah ditujukan terhadap manusia atau yang ghaib yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram,

sjelalu timbul kericuhan keluarga maka masyarakat Desa melakukan upacara MERUWAT DESA atau BERSIH DESA dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus terganggu.

Prof. I Made Widnyana, S.H menyatakan bahwa delik adat ialah=h hukum yang hidup yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan Pengurus Adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Prof. Dr. Mr. R. Soepomo, dimana Soepomo tidak mengemukakan suatu definisi tentang delik adat, melainkan Soepomo menjelaskan bahwa “ juga didalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan yang ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum juga hukum itu di perkosa.”

Lesquiller didalam bukunya *Het Adat Delictenrecht In De Magische Wereld Beeschouwing*, menyatakan bahwa “pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau peristiwa yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup di dalam masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Pengertian lain yang disampaikan Bushar Muhammadd tentang delik adat sebagai berikut : Suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan

pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.¹¹

Cornelis Van Houven mengatakan, ada atau lahirnya delik adat melalui cara pandang bangsa Indonesia sendiri, sehingga tidak tergantung kekuasaan negara tetapi berorientasi kepada realitas kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung.¹²

Terjadinya atau lahirnya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Pada pokoknya, didalam delik adat terdapat empat unsur yang penting, yaitu :

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan keguncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Berbicara mengenai Sifat Hukum Adat Delik, terdapat beberapa pendapat, diantaranya

Menurut Prof Widnyana, S.H. hukum pidana adat mempunyai sifat, antara lain:

- a. Menyeluruh dan menyatukan
Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.

¹¹ Busharr Muhammad, *Pokok –Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 68.

¹² Agus Sudaryanto dan Sigid Riyanto, “*Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonporo Yogyakarta.*” *Jurnal Fakultas Hukum UGM*, Vol 28 No. 1, Februari 2016. hlm. 48.

- b. Ketentuan yang terbuka
Hal ini didasarkan kepada ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi, sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa ataupun perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan
Apalagi terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
- d. Peradilan dengan permintaan
Menyelesaikan pelanggaran adat, sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau yang diperlakukan tidak adil.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi
Tidak hanya dapat dikenakan pada sipelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga di bebaskan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang berlaku.

Didalam buku Pengantar Ilmu Hukum Adat, H. Hilman Hadikusuma, S.H mengatakan aturan-aturan hukum mengenai pelanggaran adat pada umumnya bersifat:

- a. Tradisional magis religius
- b. Menyeluruh dan menyatukan
- c. Tidak *Prae Existence*
- d. Tidak menyamaratakan
- e. Terbuka dan lentur
- f. Terjadinya delik adat

Menurut I Made Widnyana, Delik adat itu terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.¹³

Pada dasarnya pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/upaya adat atau juga disebut reaksi adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-

¹³ Tolib, Op. Cit. hlm. 345-347.

kewajiban/pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immateriil. Reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, misalnya :

- a. Penggantian kerugian immateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani;
- c. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.¹⁴

Bentuk-bentuk sanksi adat tersebut dalam perkembangannya tentu telah mengalami perubahan mengikuti perasaan keadilan masyarakat itu sendiri. Di samping itu pula sanksi-sanksi tersebut harus sudah ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang telah diakui secara universal.

¹⁴ I Made Widnyana, *Kapita Salekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm. 8.